



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024





ပိဗ်းကိန္တုၤ ဂုၤကတၢၢ် ဂုၤကတၢၢ်

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

တၢ်ကိန္တုၤ တၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲး

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

တၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲးတၢ်ပျဲး

Jl. Mataram No. 2 Denpasar, Telepon (0361) 229786 Fax (0361) 229785
Laman : www.bkpsdm.denpasarkota.go.id, Pos-el : bkpsdm.kotadps@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar

Drs. I Wayan Sudiana
Pembina Utama Muda
NIP. 1966504 199303 1 020

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan



Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar Tahun 2024 tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan Keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan BKPSDM yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR s.d 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	v
NERACA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR s.d 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR s.d 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR s.d 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BKPSDM	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Kebijakan Keuangan	7
2.2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
3.2 Dasar Penyusunan dan Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	21
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
4.1.1 Pendapatan	22
4.1.2 Belanja	22
4.1.3 Pembiayaan	24
4.2 Pos-pos Neraca	25
4.2.1 Aset Lancar	25
4.2.2 Aset Tetap	27
4.2.3 Kewajiban	32
4.2.4 Ekuitas	33
4.3 Pos-pos Laporan Operasional	34
4.3.1 Pendapatan	34

	4.3.2	Beban	35
4.4		Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
	4.4.1	Ekuitas Awal	36
	4.4.2	Surplus (defisit) LO	36
	4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	36
	4.4.4	Ekuitas Akhir	36
BAB V		PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	38
	5.1	Gambaran Umum	38
		5.1.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	39
	5.2	Rekening Pemerintah	40
	5.3	Pengungkapan lain-lain	41
BAB VI		PENUTUP	43
LAMPIRAN - LAMPIRAN			

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

1.1	Saldo Kas Di Pemegang Kas (Bendaharawan) Per 31 Desember 2024	47
1.2	Data Utang Per 31 Desember 2024	48
1.3	Realisasi Belanja Langsung/Fungsional Per 31 Desember 2024	49

LAMPIRAN II

2.1	Belanja Modal Per 31 Desember 2024	51
2.2	Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2024	52
2.3	Data Aset, Penyusutan, dan Amortisasi Per 31 Desember 2024	53
2.4	Data Persediaan / Sisa Barang Per 31 Desember 2024	54

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan HPKDYD				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	-	-		-
8	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
9	JUMLAH PENDAPATAN (7+8)	-	-		-
10					
11	BELANJA				
12	BELANJA OPERASI				
13	Belanja Pegawai	12.072.929.554,00	10.960.194.247,00	90,78	8.422.853.098,00
14	Belanja Barang dan jasa	13.439.233.093,00	11.196.409.066,00	83,31	5.517.808.867,00
15	Belanja Bunga				
16	Belanja Subsidi				
17	Belanja Hibah	-			-
18	Belanja Bantuan Sosial				
19	Belanja Bantuan Keuangan				
20	Jumlah Belanja Operasional (13 s.d. 19)	25.512.162.647,00	22.156.603.313,00	86,85	13.940.661.965,00
21					
22	BELANJA MODAL				
23	Belanja Tanah	663.293.000,00	619.867.000,00		
24	Belanja Peralatan dan Mesin				
25	Belanja Gedung dan Bangunan	663.293.000,00	619.867.000,00	93,45	178.750.000,00
26	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
27	Belanja Aset Tetap Lainnya				
28	Konstruksi dalam pengerjaan	-			-
29	Jumlah Belanja Modal (23 s.d. 28)	663.293.000,00	619.867.000,00	93,45	178.750.000,00
30	JUMLAH BELANJA (20 + 29)	26.175.455.647,00	22.776.470.313,00	87,01	14.119.411.965,00
31					
32	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (9-30)	(26.175.455.647,00)	(22.776.470.313,00)	87,01	(14.119.411.965,00)
33					
34	PEMBIAYAAN				
35	Penerimaan Pembiayaan				
36	Pengeluaran Pembiayaan				
37	Pembiayaan Netto (33-36)				
38					
39	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (32+37)	(26.175.455.647,00)	(22.776.470.313,00)	87,01	(14.119.411.965,00)

Denpasar, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia Kota Denpasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	2024	2023
1	ASET		
2	Aset Lancar	2,109,002,920.00	301,524,143.00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	42,115,750.00	87,436,860.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Piutang Pajak	-	-
6	Penyisihan Piutang	-	-
7	Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	-	-
8	Persediaan	42,115,750.00	87,436,860.00
	- ATK	3,495,000.00	13,194,400.00
	- Alat Listrik	-	160,000.00
	- Perangko, Materai dan Benda Pos	500,000.00	500,000.00
	- Barang Cetak	25,000,000.00	25,000,000.00
	- BBM dan Oli	7,700,000.00	35,450,000.00
	- Perabot Kantor	-	-
	- Pakaian dinas beserta kelengkapannya	3,390,750.00	3,390,750.00
	- Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	600,000.00
	-Bahan Komputer	2,030,000.00	9,141,710.00
	-Bahan Lainnya	-	-
	- Suku Cadang Lainnya	-	-
	- Isi Tabung Gas	-	-
	- Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
	-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
	- Bahan - Bibit Tanaman	-	-
	-Pakaian Adat Derah	-	-
9	Jumlah Aset Lancar	42,115,750.00	87,436,860.00
10			
11	Jumlah Investasi Non Pemanen		
12	Dana Bergulir		
13	Investasi Permanen Pernyataan Modal Pemerintah Daerah		
14	Jumlah Investasi Permanen		
15	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
16			
17	Aset Tetap	7,797,002,076.00	4,478,864,522.56
18	Tanah	372,330,000.00	-
19	Peralatan dan Mesin	5,092,780,676.00	4,431,013,122.56
20	Gedung dan Bangunan	2,284,040,000.00	-
21	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,829,000.00	2,829,000.00
22	Aset Tetap Lainnya	45,022,400.00	45,022,400.00
23	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,730,114,906.00)	(4,277,442,239.56)
	- Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin	(4,402,647,179.00)	(4,234,922,045.56)
	- Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(1,282,869,133.00)	-
	- Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Bagunan	(854,594.00)	(783,869.00)
	- Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(43,744,000.00)	(41,736,325.00)
25	Jumlah Aset Tetap	2,066,887,170.00	201,422,283.00
26			
27	Aset Lain-lain		
28	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
29	Aset Lain-lain	135,499,446.56	246,719,033.00
30	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(135,499,446.56)	(242,744,033.00)
31	Aset Tak Berwujud	52,140,000.00	52,140,000.00
32	Amortisasi ATB	(52,140,000.00)	(43,450,000.00)
33	Jumlah Aset Lain-lain	-	12,665,000.00
34	JUMLAH ASET	2,109,002,920.00	301,524,143.00

No	Uraian	2024	2023
35			
36	KEWAJIBAN	7,786,177.00	7,054,868.00
37	Kewajiban Jangka Pendek	7,786,177.00	7,054,868.00
38	Utang Belanja	7,786,177.00	7,054,868.00
	Utang Pegawai	-	-
	<i>Utang Belanja Gaji PNS</i>	-	-
	<i>Utang Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS</i>	-	-
	<i>Utang BPJS Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS</i>	-	-
	Utang Belanja	7,786,177.00	7,054,868.00
	<i>Utang Belanja Telepon</i>	<i>791,371.00</i>	<i>806,049.00</i>
	<i>Utang Belanja Listrik</i>	<i>6,317,756.00</i>	<i>5,729,719.00</i>
	<i>Utang Belanja Air</i>	<i>677,050.00</i>	<i>519,100.00</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>	-	-
	<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	-	-
	<i>Belanja Jasa Tenaga Supir</i>	-	-
	<i>Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</i>	-	-
	<i>Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN</i>	-	-
	<i>Utang Belanja Iuran JKK Tenaga Non ASN</i>	-	-
	<i>Utang Belanja Iuran JKM Tenaga Non ASN</i>	-	-
	<i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</i>	-	-
	<i>Utang Aci-aci</i>	-	-
	<i>Utang Surat Kabar/Majalah</i>	-	-
	<i>Utang Belanja Paket Pengiriman</i>	-	-
	Utang Belanja Jasa	7,786,177.00	7,054,868.00
39	Utang Belanja Modal		
40	Jumlah Kewajiban 37 s/d 39)	7,786,177.00	7,054,868.00
41			
42	EKUITAS		
43	Ekuitas		
44	Jumlah Ekuitas	2,101,216,743.00	294,469,275.00
45	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,109,002,920.00	301,524,143.00

Denpasar, 31 Desember 2024

A Pengguna Anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Denpasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	
				Nominal	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
5	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
6	Pendapatan HPKDYD				
7	Lain-lain Pend. Asli Daerah yang Sah				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
9	Lain-lain Pend. Daerah yang Sah				
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00		
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00		
	Pendapatan Lainnya				
10	JUMLAH PENDAPATAN				
11					
12	BEBAN				
13	Beban Pegawai	10.960.194.247,00	8.422.853.098,00	2.537.341.149,00	23,15
14	Beban Barang dan Jasa	11.242.461.485,00	5.512.135.227,00	5.730.326.258,00	50,97
15	Beban Bunga				
16	Beban Subsidi				
17	Beban Hibah				
18	Beban Bantuan Sosial				
19	Beban Penyusutan	1.570.522.113,00	352.153.713,00	1.218.368.400,00	77,58
20	Beban Amortisasi	8.690.000,00	(228.485.292,00)	237.175.292,00	2.729,29
21	Beban penyisihan				
22	Beban Transfer				
23	Beban Lain-lain				
24	JUMLAH BEBAN	23.781.867.845,00	14.058.656.746,00	9.723.211.099,00	69,16
25					
26					
27					
28	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
29	Surplus Penjualan aset Nonlancar				
30	Surplus Peny. Kewajiban jk panjang				
31	Pemulihan penyisihan piutang				
32	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - Lo				
33	Defisit Penjualan aset Nonlancar	3.975.000,00	-	3.975.000,00	
34	Defisit Peny. Kewajiban jk panjang				
35	Surplus (defisit) Keg. Non ops				
36	Beban Luar Biasa				
37	Jumlah Surplus(defisit) Non Ops	3.975.000,00	-	3.975.000,00	-
38	Jumlah Surplus(defisit) Non Ops	3.975.000,00	-	3.975.000,00	-
39	Jumlah Beban	23.785.842.845,00	14.058.656.746,00	9.727.186.099,00	69,19
40	SURPLUS (DEFISIT) -LO (10-31)	(23.785.842.845,00)	(14.058.656.746,00)	(9.727.186.099,00)	(69,19)

Denpasar, 31 Desember 2024
Peguna Anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

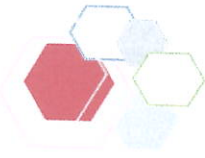
No	Uraian	2024	2023
1	Ekuitas Awal	294.469.275,00	230.672.056,00
2	Surplus (Defisit) LO	(23.785.842.845,00)	(14.058.656.746,00)
3	RK PPKD	22.776.470.313,00	14.119.411.965,00
4	Koreksi Saldo Awal Piutang		
5	Koreksi Aset Tanah		
6	Koreksi Peralatan Mesin		(162.577.033,00)
7	Koreksi Gedung dan Bangunan		
8	Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan		
9	Koreksi Aset Tetap		
10	Koreksi Aset Tetap Lainnya		
11	Koreksi KDP		
12	Koreksi Saldo Penyusutan aset tetap		
13	RK PPKD Barang		
14	Koreksi Aset Lain-lain		165.619.033,00
15	Koreksi lain-lain		
16	Mutasi Aset Masuk	3.203.120.000,00	
17	Mutasi Aset Keluar	(387.000.000,00)	
	Jumlah Ekuitas Akhir	2.101.216.743,00	294.469.275,00

Denpasar, 31 Desember 2024

Petanggung Jawab
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar



**Catatan atas
Laporan Keuangan
(CaLK)**



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 di susun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Milik Daerah dan sebagai entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BKPSDM yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BKPSDM mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BKPSDM untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. CaLK menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.



BKPSDM berupaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dengan pengungkapan posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government*.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKPSDM Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dikelola oleh BKPSDM Tahun Anggaran 2024, dengan cara yakni:

- 1) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh



- aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- 2) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 4) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan BKPSDM Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan BKPSDM Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang – undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- 12) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 36);
- 13) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 67);
- 14) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2022;
- 15) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.

1.3. *Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan*

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan



dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja keuangan
- 2.3 Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
- 2.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang di tetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Pendapatan
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Pembiayaan
- 4.2 Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset Lancar
 - 4.2.2 Aset Tetap
 - 4.2.3 Kewajiban
 - 4.2.4 Ekuitas
- 4.3 Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.3.1 Pendapatan
 - 4.3.2 Beban
- 4.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas



4.4.1 Ekuitas Awal

4.4.2 Surplus (defisit) LO

4.4.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

4.4.4 Ekuitas Akhir

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA DENPASAR

5.1 Gambaran Umum BKPSDM Kota Denpasar

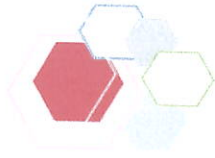
5.2 Rekening Pemerintah

5.3 Pengungkapan Lain-lain

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

6.2 Saran/Rekomendasi



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Mengingat pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atas pungutan lainnya yang dibebankan pada masyarakat maka di dalam melakukan pungutan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar. Begitu juga dalam hal belanja daerah dilakukan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam hal manajemen Kepegawaian. BKPSDM bertanggungjawab terhadap pencapaian Misi ke-3 Pemerintah Kota Denpasar yakni Kejujuran Dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan mengemban misi tersebut, BKPSDM memiliki peran penting dalam mengelola anggaran untuk pengembangan SDM yang berkualitas, melakukan proyeksi anggaran yang realistis dan mengalokasikan dana



sesuai dengan prioritas untuk pengembangan SDM, sehingga setiap program/kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan Kota Denpasar dalam jangka panjang.

Dengan demikian Sub bag keuangan berada dibawah sekretariat BKPSDM bertanggungjawab melakukan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Adapun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BKPSDM Kota Denpasar untuk Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Kenaikan/ Penurunan
	Belanja Daerah	23.519.412.557	26.175.455.647	2.656.043.090
1	Belanja Operasi	23.147.093.557	25.512.162.647	2.365.069.090
	Belanja Pegawai	11.676.335.232	12.072.929.554	396.594.122
	Belanja Barang dan Jasa	11.470.758125	13.439.233.093	1.968.474.968
2	Belanja Modal	372.319.000	663.293.000	290.974.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.319.000	663.293.000	290.974.000
	Defisit/Surplus	- 23.519.412.557	-26.175.455.647	-2.656.043.090

Sumber: DPA, DPPA Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh BKPSDM Kota Denpasar adalah berupaya memaksimalkan kinerja, dengan menempuh kebijakan antara lain:

- 1) Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada ASN Kota Denpasar
- 2) Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja
- 3) Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan



mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang terus berubah (dinamis)

- 4) Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mewujudkan sasaran kinerja.

2.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan BKPSDM Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024 dilihat berdasarkan capaian realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024. Berikut ini disajikan Pencapaian Tahun 2024 Pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Daya Capai (%)	Sisa Anggaran
Belanja Daerah					
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	12.072.929.554,00	10.960.194.247,00	90,78%	1.112.735.307,00
	Belanja Barang dan Jasa	13.439.233.093,00	11.196.409,066,00	83,31%	2.242.824.027,00
2	Belanja Modal				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	663.293.000,00	619.867.000,00	93,45%	43.426.000,00
	Jumlah Belanja	26.175.455.647	22.776.470.313	87,01	3.391.873.334
	Jumlah Belanja	26.175.455.647	22.776.470.313	87,01	3.391.873.334

Sumber: LRA BKPSDM per 31 Des 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, rata-rata daya capai kinerja keuangan pada BKPSDM sampai dengan Desember Tahun 2024 adalah 87,01 %. Hal ini menggambarkan Kinerja keuangan “baik” karena mampu mendekati target 100% serapan anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja keuangan BKPSDM Kota Denpasar berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.



Tabel 2.3
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan September) (RP)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RP)
				TARGET	REALISASI	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.072.929.554,00	10.960.194.247,01	100,00	90,78	1.112.735.307,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.600.000,00	6.580.000,00	100,00	99,70	20.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.325.100,00	193.723.950,00	100,00	71,40	77.901.150,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.274.000,00	125.924.000,00	100,00	95,20	6.350.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.220.000,00	11.220.000,00	100,00	100,00	0
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.858.000,00	6.964.000,00	100,00	58,73	4.894.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.704.000,00	161.329.906,00	100,00	68,74	73.374.094,00
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	663.293.000,00	619.867.000,00	100,00	93,45	43.426.000,00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	7.968.096,00	100,00	99,60	31.904,00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.400.000,00	107.749.863,00	100,00	60,74	69.650.137,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	862.111.280,00	848.628.048,00	100,00	98,44	13.483.232,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.356.000,00	175.051.100,00	100,00	58,28	125.304.900,00
13	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	201.183.000,00	139.602.050,00	100,00	69,39	61.580.350,00
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.839.713,00	222.599.115,00	100,00	87,69	24.128.598,00
15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	871.637.000,00	43.369.000,00	100,00	5,66	822.268.000,00
16	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	58.000.000,00	43.842.000,00	100,00	75,59	14.158.000,00
17	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	94.500.000,00	90.500.000,00	100,00	95,77	4.000.000,00
18	Pengelolaan Mutasi ASN	110.100.000,00	61.060.000,00	100,00	55,46	49.040.000,00



19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.500.000,00	6.045.000,00	100,00	80,60	1.455.000,00
20	Pengelolaan Promosi ASN	28.870.000,00	18.161.000,00	100,00	62,91	10.709.000,00
21	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6.735.317,00	6.023.285.857,00	100,00	89,43	712.031.143,00
22	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	505.314.000	422.994.997,00	100,00	83,71	82.319.003,00
23	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.557.124.000,00	2.473.811.084,00	100,00	96,74	83.312.916,00
JUMLAH		26.175.455.647,00	22.776.470.313,00	100,00	87,01	3.391.873.334,00

Sumber: Laporan (Movev) Realisasi Keuangan Belanja Langsung Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, Rata-rata capaian kinerja keuangan pada BKPSDM sampai dengan Desember Tahun 2024 secara keseluruhan adalah 87,01 %. Hal ini menggambarkan Kinerja keuangan dikategorikan Baik, meskipun ditunjukkan masih ada beberapa program dan kegiatan realisasinya dibawah 80%. Dikarenakan :

1. Belanja Gaji tidak terealisasi maksimal dikarenakan adanya tambahan anggaran atas proyeksi Gaji PPPK formasi Th 2024
2. Kegiatan Pengadaan PNS dan PPPK dianggarkan utk pelaksanaan mandiri di BKPSDM Provinsi (belanja sewa gedung, sarpras kegiatan CAT, dll) namun dalam pelaksanaannya Tahun 2024 saat ini ada kebijakan bahwa pelaksanaan seleksi dilakukan



oleh Panitia Seleksi Nasional yang difasilitasi dari BKN Pusat sehingga yang dapat direalisasikan hanya belanja Makmin kegiatan, ATK,dll sesuai kebutuhan.

3. Belanja Kursus-kursus Singkat dan Pelatihan/Bimtek/Workshop tidak terealisasi maksimal karena adanya Crosscutting anggaran Bimtek OPD yang pemanfaatannya tidak dimaksimalkan oleh OPD Terkait.
4. Adanya Efisiensi atas Belanja Modal.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKPSDM Kota Denpasar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Informasi yang disajikan berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang sudah dikelola pada periode TA 2024.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

BKPSDM Kota Denpasar awalnya merupakan Bagian Kepegawaian yang berkantor pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar" maka Bagian Kepegawaian kemudian menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya dikarenakan terdapat perluasan fungsi pelayanan maka terdapat perubahan kembali yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang "Organisasi dan tata kerja Lembaga



Teknis Daerah Kota Denpasar” dengan demikian BKD berubah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar yang mengemban Tugas Pokok yaitu ”membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”.

Kemudian Lima tahun setelah Perda tersebut diatas dilaksanakan, BKPP kemudian berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016. Pada Perubahan ini BKPSDM juga mengalami perubahan struktur organisasi. Tugas dan Fungsi BKPSDM adalah bertanggungjawab dalam hal manajemen Kepegawaian, termasuk implementasi sistem merit untuk mencapai kinerja yang optimal yaitu memastikan bahwa promosi, penghargaan, dan kebijakan lainnya didasarkan pada prestasi dan kompetensi pegawai.

3.2 Dasar Penyusunan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar yang disusun dan disajikan dalam mata uang rupiah.

- 1) Entitas yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah BKPSDM Kota Denpasar.
- 2) Laporan Keuangan terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Neraca
 - c) Laporan Operasional
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan



2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 adalah:

- 1) **Basis Kas (*Cash Basis*)**. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) **Basis Akrua (*Accrual Basis*)**. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKPSDM Kota Denpasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan



keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BKPSDM Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomis/jenis belanja dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.



B. Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- **Aset lancar** mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Kas** adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- **Piutang** dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Persediaan** dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Aset Tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung & bangunan; jalan, irigasi & jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

**c. Aset lainnya**

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Pengakuan**a. Pengakuan piutang**

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan dinilai sebesar nilai nominal. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi.

b. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

c. Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.



3. Pengukuran

Persediaan disajikan dengan cara :

1. Menggunakan metode pencatatan *First In First Out* (FIFO);
2. Harga pembelian/perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
3. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4. Harga/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
5. Dalam hal akhir tahun anggaran, persediaan dicatat menggunakan nilai perolehan terakhir diperoleh/dibeli.

4. Depresiasi/Penyusutan

- Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang :
 - a. Diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
 - b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
 - c. Ditahan oleh suatu entitas untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yaitu dengan mengalokasikan nilai



yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

C. Beban

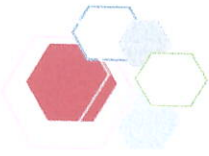
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Kewajiban

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, utang bunga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.



2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

E. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Pengelola transaksi keuangan dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan menjalankan Sistem Akuntansi yang merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan/penjurnalan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Secara berkala PPK-OPD melakukan posting buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD
- (b) Neraca SKPD
- (c) Laporan Operasional SKPD
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi pendapatan.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik/Turun	
	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
Pendapatan	0	0	0	0

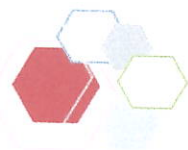
4.1.2 Belanja

Tabel 4.2
Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Daya Capai	Sisa Anggaran
				(%)	
Belanja Daerah					
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	12.072.929.554,00	10.960.194.247,00	90,78%	1.112.735.307,00
	Belanja Barang dan Jasa	13.439.233.093,00	11.196.409.066,00	83,31%	2.242.824.027,00
2	Belanja Modal				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	663.293.000,00	619.867.000,00	93,45%	43.426.000,00
	Jumlah Belanja	26.175.455.647	22.776.470.313	87,01%	3.398.985.334
	Jumlah Belanja	26.175.455.647	22.776.470.313	87,01%	3.398.985.334

Sumber: LRA BKPSDM per 31 Des 2024 (data diolah)

Tabel 4.2 diatas menyajikan Belanja pada BKPSDM Kota Denpasar pada Tahun 2024 terdiri atas belanja operasi dan belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Total



realisasi belanja Tahun 2024 yaitu Rp. 22.776.470.313,00 atau 87,01 % dari Pagu anggaran sebesar Rp. 26.175.455.647,00. Total sisa anggaran secara menyeluruh sebesar Rp. 3.398.985.334,00 yakni dari belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Adapun sisa anggaran sebesar Rp.1.112.735.307,00 karena adanya tambahan anggaran atas proyeksi Gaji PPPK formasi Th 2024 sehingga Belanja Gaji tidak terealisasi maksimal. Kemudian Belanja barang & jasa dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.242.824.027,00 karena (1) Belanja atas Keg. Seleksi Pengadaan CASN/PPPK difasilitasi oleh BKN; (2) Belanja kursus singkat/Bimtek tidak terealisasi maksimal karena adanya *Crosscutting* anggaran Bimtek OPD yang pemanfaatannya tidak dimaksimalkan oleh OPD Terkait; dan untuk belanja Modal sebesar Rp. 43.426.000,00 dikarenakan Adanya efisiensi.

Belanja Modal

BKPSDM di Tahun anggaran 2024 ada pengadaan Belanja Modal sebesar Rp.619.867.000,- dengan Perbandingan belanja modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi Belanja Modal		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	619.867.000	178.750.000	441.117.000	71,16
	Total Belanja Modal	619.867.000	178.750.000	441.117.000	71,16

Sumber: LRA BKPSDM Per 31 Des 2024

Realisasi belanja modal Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2023 terjadi Kenaikan sebesar 71,16%. Hal ini karena adanya upaya pengadaan beberapa sarana prasarana kantor dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan. Adapun



kegiatan Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024 Pada BKPSDM Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Belanja Modal Pada BKPSDM Tahun 2024

No.	Nama Barang	Belanja Modal Barang Inventaris			Belanja Modal Aset Tak Berwujud (ATB)			Ket.
		Unit.	Harga Satuan	Jumlah	Unit.	Harga Satuan	Jumlah	
1	Lap Top	4	7.950.000,00	31.800.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
2	Kipas Angin	1	550.000,00	550.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
3	Tangga Aluminium	1	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
4	Tablet PC	5	21.200.000,00	106.000.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
5	Webcam	1	21.645.000,00	21.645.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
6	Tripod Camera	1	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
7	A.C. Split	1	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
8	Videotron/Video Monitor	2	124.875.000,00	249.750.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
9	Sound System	1	47.250.000,00	47.250.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
10	Sound System	1	47.707.000,00	47.707.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
12	Lap Top	6	7.950.000,00	47.700.000,00	-	-	-	Anggaran Perubahan
13	Televisi	1	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
14	Pompa Air	1	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
15	CCTV - Camera Control Television System	1	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
16	PABX	1	23.250.000,00	23.250.000,00	-	-	-	Anggaran Induk
Total				619.867.000,00				

Sumber: Data Rekap Belanja Modal TA.2024

4.1.3 Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

BKPSDM Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi penerimaan pembiayaan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

BKPSDM Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi pengeluaran pembiayaan.



4.2 Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 42.115.750,00 dan Rp. 87.436.860,00 Secara rinci data rincian aset lancar per 31 Desember 2024 dan aset lancar per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 4.5. di bawah ini.

Tabel 4.5
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
3.	Piutang Retribusi	0	0
4.	Piutang Lain-lain	0	0
5.	Persediaan	42.115.750,00	87.436.860,00
Jumlah Aset Lancar		42.115.750,00	87.436.860,00

Sumber: Neraca BKPSDM Per 31 Des 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, Aset lancar di BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 terdiri atas barang Persediaan senilai Rp. 42.115.750,00.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kota Denpasar yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke kas Daerah per tanggal neraca.

2. Persediaan

Pembukuan barang persediaan pada BKPSDM Kota Denpasar menggunakan metode perpetual dimana pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran



persediaan. Penilaiannya dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out* (FIFO) dimana penilaian barang persediaan dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang di keluarkan pertama.

Catatan atas Laporan Barang Persediaan Tahun 2024 merupakan laporan aset lancar yang mencakup seluruh aspek barang persediaan yang ditatausahakan dan dikelola oleh BKPSDM. Nilai barang persediaan berdasarkan stok opname Tahun 2024 yang disajikan pada laporan ini adalah sebesar Rp. 42.115.750,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Berikut ini disajikan Laporan Barang Persediaan yang terdiri atas:

1. Saldo Awal Barang Persediaan

Saldo awal Barang Persediaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 87.436.860,00. Saldo ini merupakan Stock Opname Tahun 2023.

2. Ringkasan Mutasi Barang Persediaan

Mutasi Barang Persediaan pada BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Barang Persediaan Pada BKPSDM Tahun 2024

JENIS BARANG	SALDO AWAL 2024	Mutasi Masuk (Belanja)	Mutasi Keluar (Disalurkan)	STOCK OPNAME 2024
ATK	13.194.400	77.845.300	87.544.700	3.495.000
Bahan Komputer	9.141.710	68.107.000	75.218.710	2.030.000
Bahan Cetak	25.000.000,0	22.643.850	22.643.850	25.000.000
Benda Pos - Materai	500000	6.000.000	6.000.000	500.000
BBM dan Pelumas	35.450.000	121.854.000	149.604.000	7.700.000
Suku Cadang Lainnya	0	32.867.000	32.867.000	0
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	1.282.050	1.282.050	0
Alat Listrik	160.000	6.580.000	6.740.000	0
Bahan - Bibit Tanaman	0	22.548.000	22.548.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas	3.390.750	0	0	3.390.750
Pakaian Adat Daerah	0	42.000.000	42.000.000	0



Perabot Kantor	0	0	0	0
Alat/ Bahan Kegiatan Kantor lainnya	600.000	42.352.800	42.952.800	0
Bahan Lainnya	-	138.689.000	138.689.000	
JUMLAH	87.436.860	582.769.000	628.090.110	42.115.750

Sumber: Lap. Barang Persediaan, BKPSDM, 2024

3. Rincian Stock Opname

Sesuai dengan Pemeriksaan Opname Fisik (*Stock Opname*) Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebanyak 6 (Enam) jenis barang persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor dengan sisa saldo yakni sebesar Rp. 42.115.750,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) adapun kondisi barang persediaan tersebut dalam keadaan baik. Barang Persediaan dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi jenis – jenis Persediaan (ATK, Bahan Komputer, Bahan Cetak, Benda Pos – Materai, BBM dan Pelumas, Pengadaan Pakaian Dinas).

Catatan:

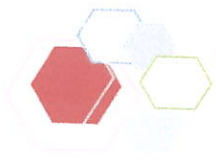
- Terdapat item barang persediaan yang disimpan lebih dari 4 tahun semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun barang tersebut adalah :

- Workshop Kit 11 set
- Bahan Pakaian Dinas dan Atribut pegawai 15 potong/set
- SK ASN,ASN,Pensiun 2000 lembar

4.2.2 Aset

1. Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.7.797.002.076,- dan Rp.4.478.864.522,56 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam



kegiatan operasional BKPSDM Kota Denpasar. Rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Tanah	372.330.000,00		372.330.000,00	100,00
2	Peralatan & mesin	5.092.780.676,00	4.431.013.122,56	661.767.553,44	14,39
3	Gedung & bangunan	2.284.040.000,00		2.284.040.000,00	100,00
4	Jalan, irigasi & jaringan	2.829.000,00	2.829.000,00	-	-
5	Aset tetap lainnya	45.022.400,00	45.022.400,00	-	-
	Jumlah	7.797.002.076,00	4.478.864.522,56	3.318.137.553,44	74,08

Sumber: Data Aset (Lampiran II CaLK) BKPSDM Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp. 3.318.137.553,44,- atau 74,08% karena adanya mutasi masuk asset tanah dan bangunan, dan mutasi masuk keluar atas aset kendaraan roda empat. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tanah

Berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/1796/BPKAD/2024 tanggal 19 Maret 2024 BKPSDM menerima Tanah senilai Rp.372.330.000,-

2) Peralatan & Mesin

Pada BKPSDM Kota Denpasar untuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang dikelola terdiri dari Alat Angkutan; alat kantor dan rumah tangga; Alat studio, komunikasi dan pemancar; alat laboratorium; computer; Peralatan Olahraga; dan Alat Bantu (Mesin Pompa Air).

Tabel 4.8.
Mutasi Aset Pada BKPSDM Tahun 2024

Uraian	Saldo 31 Des 2023 audited BPK	Mutasi		Neraca saldo sistem
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan & mesin	4.431.013.122,56	1.166.617.000,00	504.849.446,56	5.092.780.676,00

Sumber: Data Mutasi Aset TA.2024 (data diolah)



Berdasarkan data Pada table 4.8 Dapat disampaikan bahwa Saldo Peralatan dan mesin pada BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 adalah Rp. 5.092.780.676,00 Total mutasi masuk peralatan dan mesin selama periode laporan dengan Penambahan sebesar Rp 1.166.617.000,00 Penambahan ini merupakan hasil pengadaan Belanja Modal Tahun 2024 Sebesar Rp.619.867.000,- dan mutasi masuk mobil sebanyak 2 Unit senilai Rp.546.750.000,- dengan BAST Nomor 000.2.3.2/8270/BPKAD tanggal 28 Oktober 2024 Selanjutnya ada Mutasi Keluar /Pengurangan yaitu sebesar Rp.504.849.446,56,- dengan rincian yaitu: Mutasi Mobil keluar sebanyak 2 Unit dengan nilai Rp. 102.000.000 dengan BAST Nomor 000.2.3.2/8292/BPKAD tanggal 29 oktober 2024 dan Rp.285.000.000 dengan BAST Nomor 000.2.3.3/8288/BPKAD tanggal 28 Oktober 2024 dan Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Sebesar Rp. 117.849.446,56 dengan rincian sebagai berikut: Reklas senilai Rp. 114.666.446,56 dengan nomor 000.2.4/3987/BPKAD ditambahkan dengan Reklas senilai Rp. 9.000.000,- dengan Nomor 000.2.4/9322/BPKAD berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/293/HK/2024 tanggal 23 Januari 2024. Dikurangi dengan Reklas Aset yang ada di extra comptable sebesar Rp. 5.817.000,-

Aset *extra comptable* adalah asset yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.

3) Gedung dan Bangunan

Berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/1796/BPKAD/2024 tanggal 19 Maret 2024 BKPSDM menerima Tanah senilai Rp. 2.284.040.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset jalan, irigasi dan jaringan pada BKPSDM Tahun 2024 nilainya tetap karena tidak ada mutasi tambah ataupun kurang sehingga nilai buku yang tercatat per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.829.000,00.

5) Aset tetap lainnya



Aset tetap lainnya yang ada di BKPSDM terdiri dari buku dan perpustakaan; barang bercorak kebudayaan; serta aset renovasi. Oleh karena tidak ada mutasi tambah atau kurang pada aset tetap lainnya, sehingga Saldo akhir aset tetap lainnya di BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 adalah Rp.45.022.400,00.

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

BKPSDM Kota Denpasar tidak memiliki aset konstruksi dalam pengerjaan. Sehingga nilainya adalah nol.

2. **Aset Lainnya**

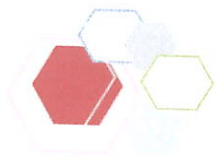
Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya di BKPSDM terdiri atas alat kantor dan rumah tangga; alat studio dan komunikasi; dan software/ATB. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 4.9.
Aset Lainnya pada BKPSDM Tahun 2024

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023 audited BPK	Mutasi		Neraca saldo
			Penambahan	Pengurangan	
1	Aset Lainnya (Alat kantor dan RT)	246.719.033,00	117.849.446,56	229.069.033,00	135.499.446,56
3	Aset tak berwujud (Software/ATB)	52.140.000,00	0		52.140.000,00
		298.859.033,00	117.849.446,56	229.069.033,00	187.639.446,56

Sumber: Data Rekap Mutasi Aset TA.2024 (data diolah)

Untuk Mutasi aset lainnya Pada Tahun 2024 terdapat penambahan karena adanya Reklas Rusak Berat dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp.117.849.446,00. Untuk Aset tak berwujud (Software/ATB) tidak ada mutasi tambah/kurang sehingga nilainya tetap. Mutasi kurang aset lainnya karena adanya penghapusan sebesar



Rp.229.069.033,00. Dengan demikian, Saldo akhir aset lainnya di BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 adalah Rp.187.639.446,56

3. Akumulasi Penyusutan Aset / Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tabel 4.10
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pada BKPSDM
Tahun 2024

NO	JENIS	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 JAN 2024/ Audited	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Desember 2024
			JUMLAH	
1	TANAH	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN & MESIN	3.730.072.599,00	672.574.580,00	4.402.647.179,00
3	GEDUNG & BANGUNAN	0,00	1.282.869.133,00	1.282.869.133,00
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	783.869,00	70.725,00	854.594,00
5	ASET TETAP LAINNYA	41.736.325,00	2.007.675,00	43.744.000,00
	JUMLAH	3.772.592.793,00	1.955.514.438,00	5.730.114.906,00
	Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya	117.849.446,56	-	117.849.446,56
	Aset yang dihapuskan	225.094.033,00	-	225.094.033,00

Sumber: Data Penyusutan by Simda TA.2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10 Akumulasi penyusutan aset tetap pada BKPSDM Tahun 2024 adalah Rp.5.730.114.906,00 dengan nilai buku Rp.2.066.887.170,00. Akumulasi penyusutan aset tetap - aset lainnya (RB) pada BKPSDM Tahun 2024 adalah Rp.117,849,446.56 dengan nilai buku Rp.0,-. Kemudian terdapat Aset yang dihapuskan Tahun 2024 Rp.229.069.033,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp.225,094,033.00 dan masih ada nilai buku sebesar Rp. 3.975.000,00 berdasarkan SK Penghapusan:

- 1) No.100.3.3.6/6098/BPKAD/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.165.619.033,56



- 2) SK Penghapusan No.100.3.3.6/6100/BPKAD/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.63.450.000,00.

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BKPSDM Tahun 2024 adalah Rp.52.140.000,00 dengan nilai buku Nol.

Tabel 4.11.
Amortisasi Aset tidak berwujud Pada BKPSDM Tahun 2024

NO	JENIS	AKUMULASI	AMORTISASI	AKUMULASI
		AMORTISASI 1	JUMLAH	AMORTISASI 31
		JAN		Desember 2024
		2024/audited		
1	ATB/ SOFTWARE	52.140.000,00	0,00	52.140.000,00
JUMLAH		52.140.000,00	0,00	52.140.000,00

Sumber: Data Amortisasi by Simda TA.2024 (data diolah)

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan sampai dengan akhir periode. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dan akumulasi amortisasi menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca. Hasil pengurangan harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud dengan akumulasi penyusutan/amortisasi merupakan nilai buku (*book value*) atau nilai yang dapat didepresiasi (*depreciable value*) aset tetap/aset tidak berwujud.

4.2.3. Kewajiban

BKPSDM Kota Denpasar memiliki Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024. Kewajiban Jangka Pendek ini merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai kewajiban jangka pendek yang dimaksud adalah utang belanja.



Tabel 4.12.
Utang Pada BKPSDM Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	BELANJA LISTRIK	6.317.756,00
2	BELANJA TELPON	791.371,00
3	BELANJA AIR	677.050,00
TOTAL UTANG		7.786.177,00

Sumber: Data Utang TA.2024 (data diolah)

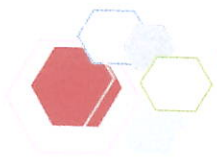
Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Terdapat utang belanja per 31 Desember 2024 berupa Utang Belanja Listrik, Telepon, dan air yang dibayar pada bulan Januari Tahun 2024. Adapun total utang belanja adalah sebesar Rp. 7.786.177,00.

4.2.4 Ekuitas

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.101.216.743,00 dan Rp. 294.469.275,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) seperti tercantum pada Lampiran LPE Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Tabel 4.13
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

No	Uraian	2024	2023
1	Ekuitas Awal	294.469.275,00	230.672.056,00
2	Surplus (Defisit) LO	(23.785.842.845,00)	(14.058.656.746,00)
3	RK PPKD	22.776.470.313,00	14.119.411.965,00
4	Koreksi Peralatan Mesin		(162.577.033,00)



5	Koreksi Aset Lain - lain		165.619.033,00
6	Mutasi Aset Masuk	3.203.120.000,00	
7	Mutasi Aset Keluar	(387.000.000,00)	
	Jumlah Ekuitas Akhir	2.101.216.743,00	294.469.275,00

Sumber: LPE TA.2024 (data diolah)

Ekuitas awal pada tahun 2024 sebesar Rp. 294.469.275,00 yang merupakan ekuitas akhir pada tahun 2023. Oleh karena terjadi defisit, sehingga saldo RK-PPKD akan ditambahkan ke Ekuitas. Jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan ke ekuitas diposting agar neraca BKPSDM menggambarkan adanya hubungan antara jumlah aset yang dikuasai dengan kewajiban dan ekuitas BKPSDM. RK PPKD dicatat sebesar Rp.22.776.470.313,00 dan Surplus (Defisit) LO sebesar Rp. (23.785.842.845,00). Ada Mutasi Aset Masuk sebesar Rp.3.203.120.000,- terdiri dari Hibah Tanah, Bangunan, dan 2 unit kendaraan Roda empat dan Muatsi Aset Keluar berupa 2 unit kendaraan roda empat sebesar Rp. (387.000.000,00)

4.3. Pos-pos Laporan Operasional

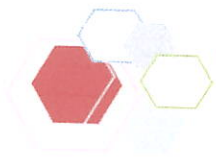
4.3.1 Pendapatan

Pada BKPSDM Kota Denpasar tidak terdapat pendapatan baik dari pendapatan daerah, pendapatan transfer maupun pendapatan lain-lain yang sah

4.3.2 Beban

1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum



berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah beban pegawai TA 2024 adalah 10.960.194.247,00 naik sebesar 23,15% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 kenaikan ini disebabkan oleh: (1) adanya penyesuaian gaji karena kenaikan pangkat dan berkala PNS; (2) Mutasi masuk (pindahan) PNS di BKPSDM sebanyak 1 orang; dan (4) PNS Pensiun Sebanyak 2 Orang. Berikut ini disajikan secara rinci beban pegawai Tahun 2024 dan 2023 pada BKPSDM Kota Denpasar pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Beban	Beban Pegawai		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1	Beban Pegawai	10.960.194.247,00	8.422.853.098,00	2.537.341.149,00	23,15
	Jumlah Beban Pegawai	10.960.194.247,00	8.422.853.098,00	2.537.341.149,00	23,15

Sumber: LO (CaLK) per 31 Des 2024

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Tahun 2024 di BKPSDM adalah Rp.11.242.461.485,00 sedangkan pada Tahun 2023 adalah Rp.5.521.135.227,00 Naik sebesar 50.97 % Rp.5.730.326.258,00 ini terjadi karena jika dibandingkan dengan Tahun 2023 untuk Tahun 2024 ini ada peningkatan realisasi belanja, nilai persediaan, dan nilai Utang untuk mendukung seluruh Program dan Kegiatan BKPSDM dalam rangka Manajemen ASN.

3. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah beban penyusutan untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp.



1.570.522.113,00. Ada Penghapusan senilai RP. 229.069.033,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Sebesar Rp.225.094.033,00 dan nilai buku sebesar Rp. 3.975.000,00

4. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Jumlah amortisasi untuk Tahun 2024 sebesar 8.690.000

4.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.446.9275,00. Nilai ekuitas awal Tahun 2024 ini merupakan nilai ekuitas akhir pada Tahun 2023.

4.4.2. Surplus (Defisit) LO

Terjadi defisit LO karena BKPSDM Kota Denpasar tidak mengelola pendapatan. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(23.785.842.845,00) dan Rp.(14.058.656.746,00)

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 atau tidak ada.

4.4.4. Ekuitas Akhir

Terjadi defisit LO sebesar Rp.(23.785.842.845,00) karena BKPSDM Kota Denpasar tidak mengelola Pendapatan. Ekuitas awal pada tahun 2024 sebesar Rp. 294.469.275,00 yang merupakan ekuitas akhir pada tahun 2023. Oleh karena terjadi defisit, sehingga saldo RK-PPKD akan ditambahkan ke Ekuitas. Jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan ke ekuitas diposting agar neraca BKPSDM



menggambarkan adanya hubungan antara jumlah aset yang dikuasai dengan kewajiban dan ekuitas BKPSDM.

RK PPKD dicatat sebesar Rp.22.776.470.313,00 dan Surplus (Defisit) LO sebesar Rp. (23.785.842.845,00). Ada Mutasi Aset Masuk sebesar Rp.3.203.120.000,00 dan Aset Aset Keluar sebesar Rp. (387.000.00,00) dengan demikian ekuitas akhir pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.2.101.216.743,00.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

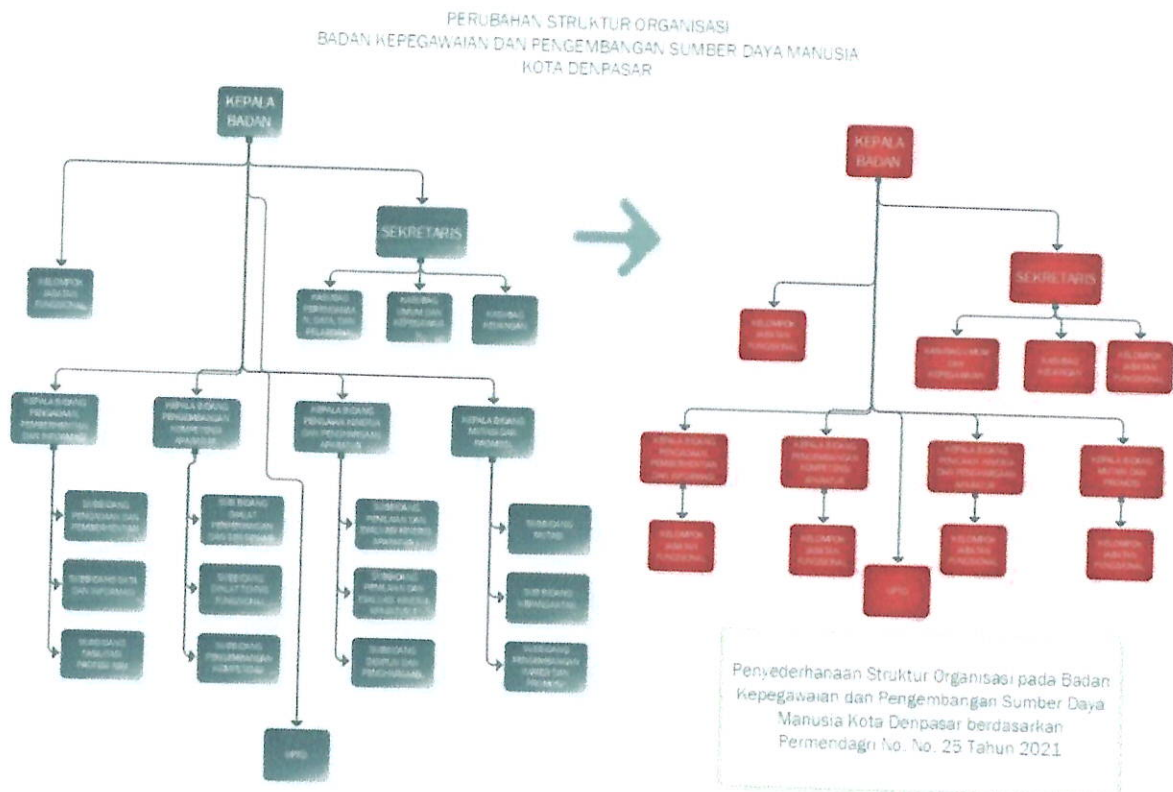
5.1. Gambaran Umum

BKPSDM Kota Denpasar awalnya merupakan Bagian Kepegawaian yang berkantor pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang "*Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar*" maka Bagian Kepegawaian kemudian menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya dikarenakan terdapat perluasan fungsi pelayanan maka terdapat perubahan kembali yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang "*Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar*" dengan demikian BKD berubah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar. Kemudian Lima tahun setelah Perda tersebut diatas dilaksanakan, BKPP kemudian berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016. Tugas dan Fungsi BKPSDM adalah bertanggungjawab dalam hal manajemen Kepegawaian, termasuk implementasi sistem merit untuk mencapai kinerja yang optimal yaitu memastikan bahwa promosi, penghargaan, dan kebijakan lainnya didasarkan pada prestasi dan kompetensi pegawai.

Pada Tahun 2021, terdapat reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, BKPSDM mengalami perubahan struktur organisasi. Konsekuensi dari perubahan organisasi ini adalah berubahnya jabatan dan sistem kerja. Jabatan pengawas pada bidang-bidang disetarakan menjadi Jabatan Fungsional

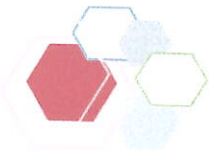
Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda, sementara Jabatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan pada Sekretariat disetarakan ke Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Khusus untuk Jabatan Fungsional Akibat Penyetaraan ini memiliki alur koordinasi dibawah Kepala Bidang, tidak seperti Jabatan Fungsional pada umumnya yang dibawah koordinasi langsung Kepala Badan.

5.1.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kota Denpasar

Pada gambar 1 di atas disajikan Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah sehubungan adanya Reformasi Birokrasi tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi.



Tugas dan Fungsi BKPSDM

BKPSDM mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Fungsi BKPSDM adalah sebagai berikut:

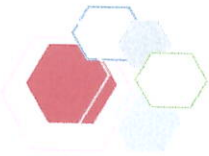
- a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan pedoman dan tugas dan fungsinya.

5.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor BKPSDM Kota Denpasar adalah:

Tabel 5.1
Nomor Rekening dan NPWP BKPSDM Kota Denpasar

No.	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	NPWP
1	Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Denpasar	011.010001932-7	00.317.483.6-901.000



5.3. *Pengungkapan Lain-lain*

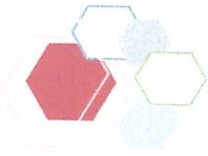
Pejabat Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024 pada BKPSDM Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- (1) Pengguna Anggaran : Drs. I Wayan Sudiana
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan : Putu Ayu Widiari, SE.,M.Si
- (3) Bendahara Pengeluaran : Dewi Maharani, SE

Berikut ini disajikan daftar nama Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada BKPSDM Kota Denpasar T.A 2024

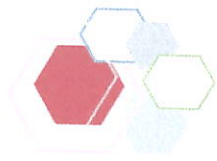
NO	NAMA NIP PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN
1	I Komang Adi Wirawan, SE, M.Si Nip.19710418199703 1 006 Pembina Tingkat I IV/b	PPK pada Sekretariat BKPSDM
2	Luh Nyoman Endi Suari, S.Sos NIP. 19731006 199303 2 003 Pembina/IV a	PPK Pada Bidang Mutasi dan Promosi
3	Putu Agus Mahendra Udayana, SE, MM NIP. 19840719201001 1 021 Penata Tk I III/d	PPK Pada Bidang Pengadan Pemberhentian dan Informasi
4	Ida Bagus Komang Yudi Sutawa, S.IP NIP. 19740709 199903 1 005 Pembina/IV a	PPK Pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
5	I Wayan Ardana, S. Kom NIP. 197709092009031004 Penata Tingkat I /IIId	PPK pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi

NO	NAMA NIP PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN
1	Ni Luh Sekar, SE Nip.19780128 199903 2 002 Penata Tk I III/d	PPTK pada Sekretariat BKPSDM
2	Ida Ayu Cininta Padangratha, S.AP.M.AP Nip.19861227 201001 2 031 Penata Tk I III/d	PPTK Pada Bidang Pengadan Pemberhentian dan Informasi



3	Faizah, SE Nip. 19680426 199603 2 001 Penata Tk I III/d	PPTK Pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
4	I Gede Widhi Artha, S. STP,MM Nip. 19791018 199810 1 001 Pembina/IV a	PPTK Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
5	Dewa Ayu Ketut Suartini, SE Nip. 19660927 199303 2 006 Penata Tk I III/d	PPTK Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
6	I Gusti Komang Arya Widana, SE Nip. 19721214 199503 1 002 Penata Tk I III/d	PPTK Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

NO	NAMA NIP PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	I Putu Reza Krisna Putra, SE Nip. 19970326 202012 1 004 Penata Muda Tk I III/b	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada BKPSDM Kota Denpasar	Januari – Mei 2024
2	Ida Ayu Mas Ganggadewi Dwijayanthi, S. Psi Nip. 19960208 202012 2 012 Penata Muda Tk I III/b	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada BKPSDM Kota Denpasar	Januari – Mei 2024
3	Ida Ayu Manik Cakradewi, SE NIP. 19921223 202421 2 004 Pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama	Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada BKPSDM Kota Denpasar	Juni – Desember 2024



BAB VI PENUTUP

BKPSDM Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Pada Tahun 2024, BKPSDM melaksanakan 3 Program, 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan umum dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 26.175.455.647,00.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada BKPSDM Kota Denpasar Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai upaya penyajian laporan yang akurat dan terdokumentasi. Berikut ini dapat disampaikan simpulan dan saran/rekomendasi.

1. Simpulan

Rata-rata Serapan Anggaran program dan kegiatan pada BKPSDM sampai dengan Desember Tahun 2024 adalah 87,01%. Hal ini menggambarkan Kinerja BKPSDM dilihat dari sisi serapan anggaran dikategorikan “baik”, Meskipun ditunjukkan masih ada beberapa program dan kegiatan realisasinya dibawah 80% yang disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah:

- 1) Belanja Gaji tidak terealisasi maksimal dikarenakan adanya tambahan anggaran atas proyeksi Gaji PPPK formasi Th 2024;
- 2) Belanja atas Keg.Pengadaan CASN/PPPK tidak terealisasi maksimal karena kegiatan seleksi difasilitasi oleh BKN;
- 3) Belanja kursus singkat/Bimtek tidak terealisasi maksimal karena adanya *Crosscutting* anggaran Bimtek OPD yang pemanfaatannya tidak dimaksimalkan oleh OPD Terkait;
- 4) Adanya efisiensi atas belanja modal.



2. Saran/Rekomendasi

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar Organisasi tetap memerhatikan kegiatan operasional yang dilaksanakan dengan mengedepankan capaian yang tepat hasil dan tepat guna terutama dalam pemanfaatan modal dan efektif, efisien dalam penggunaan aktiva lancar (Kas, dan Persediaan);
- 2) Agar Melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Lampiran I

(<https://drive.google.com/drive/folders/1IZIm66qlQ3yAYxqVjyxRnIWtjB8u0v?usp=sharing>)

Lampiran II

(https://drive.google.com/drive/folders/1T9_RKuoPUdazabm9u5UWUMZ_Svk58G2Da?usp=sharing)